

PENDIDIKAN PLURALISME AGAMA: KAJIAN TENTANG INTEGRASI BUDAYA DAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL KONTEMPORER

Saihu
Dosen Institut PTIQ Jakarta

Abstract

This paper argues that culture is a part of religion in the sense that the latter (religion) authentically aims to help bless people as well to perpetuate peace among them. This article uses the term “culture” to refer to this perpetuated value. This action is in tandem with pluralism education; that is, an education that directs its students to free themselves up from any type of prejudice, and to be capable of not only learning knowledge in their classes, but also other cultures and perspectives available in the multicultural societies. Therefore, this pluralism education expects the students to qualify themselves with empathy, tolerance and solidarity to diverse groups of people in this world. Such a tremendous pluralism education occurs in Bali, Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, pluralisme, agama, budaya, konflik

A. Pendahuluan

Michalinos Zembylas dan Zvi Bekerman, dalam Jurnalnya *Peace Education in the Present: dismantling and reconstructing some fundamental theoretical premises*,¹ menyatakan, bahwa agama tidak bisa menyelesaikan konflik sosial. Menurutnya, hanya budaya yang mampu meleraikan segala konflik dan praktik kekerasan serta gesekan-gesekan sosial lainnya yang terjadi di masyarakat. Apalagi hal ini juga terkait dengan fenomena global, yaitu adanya kekerasan dan tindakan teror atas nama agama. Sebagai contoh kasus serangan Bom di gedung WTC pada 11 September 2011 yang dipicu sentiment keagamaan seolah semakin mempertegas anggapan bahwa agama adalah sumber konflik. Bagi keduanya, toleransi dan konstruksi sosial yang positif dilihat dari sejarah serta implikasinya hanyalah bersumber dari pemeliharaan dan pemahaman terhadap kebudayaan yang dipahami secara mendalam oleh individu-individu dalam masyarakat melalui proses pendidikan tanpa melibatkan unsur agama. Padahal, menurut Roger M Keesing, budaya adalah

¹Michalinos Zembylas & Zvi Bekerman, “Peace education in the present: dismantling and reconstructing some fundamental theoretical premises”, *Journal of Peace Education*, 10 (2013): 543-556.

hanyalah potongan suatu konsep yang tajam, mengkhusus, dan teoretis dari agama.²

Thomas L Friedman,³ dalam teorinya *the world is flat*, mengindikasikan, bahwa budaya dan agama menjadi satu bahkan antara budaya dan agama diibaratkan dua kepingan mata uang yang menjadi satu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Aleksander Kobylarek, menurutnya, agama dan budaya berdiri sejajar dan sama-sama membentuk sikap individu.⁴ Sejalan dengan Kobylarek, Christian Zwingmann, berpendapat, bahwa agama dan budaya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk budi pekerti dan perilaku seseorang,⁵ karena memang pada mulanya semua nabi yang diutus Tuhan adalah untuk menyampaikan agama sebagai rahmat sekaligus pembawa kabar gembira yang menawarkan kebajikan, kebenaran, dan kedamaian hidup bagi manusia. Agama juga merupakan kekuatan untuk membebaskan manusia dari kebodohan, ketertindasan, dan pertikaian yang menyengsarakan.⁶ Maka untuk menghindarkan manusia dari kebodohan, ketertindasan, dan pertikaian, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui proses pendidikan yang baik, kompetitif, dan merata. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan dalam pengertian yang luas, bukan sekadar untuk memperoleh titel kesarjanaan, tetapi pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai agama, mendorong munculnya kebudayaan dan peradaban unggul serta dibanggakan oleh warga, tidak saja bersumber dari budaya daerah, tetapi juga bersumber dari unsur ilahiah yang terkesan terkikis pada zaman kontemporer sekarang ini.⁷ Menjawab hal tersebut, Amin Abdullah, menyatakan, bahwa diperlukan

²Roger M. Keesing, "On not understanding symbols: Toward an anthropology of incomprehension", HAU: *Journal of Ethnographic Theory*, 2, No. 2 (2012): 406-430.

³Sebuah teori yang menyebutkan bahwa bumi telah menjadi begitu datar, tak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis dan sistem lokal nasional. Interaksi antar manusia sekan begitu mudahnya, jarak seakan tidak lagi menjadi hambatan struktural yang menghambat. Lihat Thomas L Friedman, "the World is Flat" *the Globalized World in Twenty-First Century* (London: Penguin Books, 2006), 86.

⁴Aleksander Kobylarek, "Education and Culture Society", *international Scientific Journal*, No. 2 (2014): 44.

⁵Christian Zwingman, Markus Wirtz, Claudia Muller, Jorgen Korber, and Sebastian Murken, "Positive and Negative Religious coping In German Breast Cancer Patients", *Journal of Behavioral Medicine*, 29, No. 6 (2013): 517-553.

⁶Komarudin Hidayat, *Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 144.

⁷Komarudin Hidayat, *Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan*, 30. Sementara Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Tilaar, prinsip-prinsip kajian pedagogi pada abad ke-21 atau pada zaman kontemporer adalah: *Pertama*, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan yang konkret, situasional yang membawa manusia mengatasi perjuangan hidup terhadap pengaruh alam dan zaman guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta kehidupan yang tertib dan damai; *Kedua*, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan rakyat, sehingga dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan bersama dalam masyarakat, serta pendidikan tidak terlepas dari politik atau sistem

sebuah model pendidikan yang dapat mengakomodasi budaya setempat, sekaligus mempertahankan tradisi dan identitas keagamaan.⁸

Seperti diketahui, bahwa masalah utama yang dihadapi oleh para pendidik dan penggerak sosial-keagamaan pada era kemajuan plural-multikultural, adalah bagaimana masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat mengawetkan, memelihara, melanggengkan, mengalih-generasikan, serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak, namun di saat yang sama, menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang berbuat serupa. Maka, diperlukan sebuah konsep baru dari pendidikan agama yang dapat merangkul, menjaga kebersamaan, menciptakan kohesi sosial yang baik, dan keutuhan bersama, serta mampu mengintegrasikan antara agama dan budaya khususnya di Indonesia yang selanjutnya membentuk sebuah budaya *hemispheric*.⁹

Antithesis dari pernyataan di atas, menurut Abduh, adalah dengan cara mempraktikkan pendidikan agama Islam yang modern, yaitu sebuah konsep pendidikan yang menghilangkan dikotomi pendidikan yang dianut oleh sebagian umat Islam sekarang ini, atau dengan melakukan pembaharuan pendidikan melalui pengembangan seluruh komponen di dalamnya seperti politik, kelembagaan, dan kurikulum.¹⁰ Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pengembangan kurikulum, dapat dimulai dari sekolah dasar, menengah dan kejuruan, serta pengembangan kurikulum di tingkat universitas, pengembangan metode pengajaran, serta dapat mengintegrasikan pendidikan agama (substansial dan kontekstual) dengan pendidikan umum.¹¹

kekausaan. H.A.R. Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012), 974. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, menurutnya, pendidikan lebih dari sekadar proses pengajaran, jika pengajaran hanya berfokus pada proses transfer ilmu belaka, tetapi pendidikan meliputi semuanya, yaitu membentuk kesadaran dan kepribadian anak didik yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang selanjutnya dapat diwariskan kepada generasi muda. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

⁸M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Multikultural Multireligius* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 2.

⁹Pola Budaya berdimensi *emispheric* adalah bertemunya kebudayaan di seluruh belahan bumi (belahan bumi timur, karena bumi barat belum “ditemukan”), yaitu suatu dimensi yang saat itu setara dengan dimensi global. Pola budaya *hemispheric* menghasilkan terbentuknya lingkungan yang memberi kemudahan bagi penyebaran dan peneguhan agama (Islam) di kawasan Asia Tenggara. Nurholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 11

¹⁰Menurut pandangan Fazlur Rahman, halangan bagi usaha pembaruan pendidikan ada dua, yaitu: 1) adanya fenomena yang disebutnya sebagai neo-rivalisme atau neo-fundamentalisme; 2) adanya hubungan yang ganjil antara agama dan politik, yaitu dengan ditundukkannya agama oleh politik. Fazlur Rahman, *Strategi Cita-Cita Islam*, Terj. Habibi Jannati (Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2013), 32.

¹¹Ahmad Fuadi Husin, “Rekonstruksi Pendidikan Islam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh”, *Jurnal Tadris Terakreditasi Uin Sunan Ampel*, 9, No. 2 (2014): 199.

Sejalan dengan Abduh, Amin Abdullah, menyatakan, bahwa ketika berbicara modernitas sudah pasti terkait dengan dimensi pluralisme. Menurutnya, pendidikan berbasis pluralisme¹² merupakan salah satu perwujudan dari pendidikan modern, karena model pendidikan pluralisme ternyata mampu menciptakan perdamaian dan kohesi sosial yang baik, serta mampu menjadi solusi dari problematika kontemporer masyarakat dewasa ini.¹³

Menurut Bhikhu Parekh, yang dimaksud dengan pendidikan pluralisme adalah pendidikan dalam kebebasan, terbebas dari segala macam prasangka, bebas untuk mengeksplorasi serta belajar dari budaya dan perspektif lain di tengah masyarakat yang multikultural.¹⁴ Sejalan dengan Parekh, Muslimin, berpendapat, bahwa pendidikan pluralisme agama adalah pendidikan yang mengedepankan perubahan perilaku, sikap, serta kualitas karakter seseorang, dengan model pendekatan pembelajaran yang tidak sekadar mentransfer ilmu atau pengetahuan, melainkan juga harus menyentuh hati, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat mengambil keputusan terbaik buat dirinya dan lingkungan sekitarnya.¹⁵ Pendidikan pluralisme agama, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan keagamaan peserta didik, pendidikan ini juga mengorientasikan penanaman rasa empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama, baik Muslim maupun non-Muslim.

¹²Pluralisme bukan hanya berarti actual plurality (*kemajemukan atau keanekaragaman*) yang menggambarkan kesan fragmentasi (*perpecahan*), bukan pula dalam pengertian “kebaikan negatif” sebagai lawan fanatisme, melainkan sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversity within the bounds of civility*). Lihat Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur’an tentang Keragaman Agama* (Jakarta: RMBOOKS & PSAP, 2006), 59-60.

¹³Terdapat catatan kecil mengenai Pendidikan Pluralisme Agama: *Pertama*, selain memberikan uraian tentang ilmu-ilmu keislaman klasik, mahasiswa, anak didik serta masyarakat diperkenalkan dengan persoalan-persoalan modernitas yang amat kompleks sebagaimana dihadapi oleh umat Islam sekarang ini dalam hidup keseharian mereka; *Kedua*, pengajaran ilmu-ilmu keislaman tidak seharusnya selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu mengedepankan uraian dimensi historis dan doktrin-doktrin keagamaan; *Ketiga*, tipologi pengajaran yang dulu hanya bertumpu pada teks (*nash*) seperti banyak dijumpai dalam buku-buku teks mata kuliah filsafat pendidikan Islam, perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas terhadap konteks dan realitas; *Keempat*, dalam era pluralitas iman yang semakin mencuat dan menguat, diperlukan adanya diskursus yang menelaah secara akademis tentang filosofi khazanah intelektual Islam klasik, khususnya tasawuf dan telaah doktrinal dari ilmu kalam; *Kelima*, pendidikan agama era modernitas-pluralitas tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada pembentukan “moralitas-individual” yang saleh namun kurang begitu peka terhadap “moralitas-publik. M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural, Multireligius*, 76-82.

¹⁴Bikhu Parekh, “Rethinking Multiculturalism” *Cultural Diversity and Political Theory*. <http://www.educationworld.com>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.

¹⁵Muslimin, *Islam dan Pendidikan Pluralisme*. <http://channelnahdliyin.com>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.

B. Pendidikan Agama Modern: Pendidikan Pluralisme

Jika dilihat dari gagasan pemikirannya, ide pendidikan pluralisme agama sebenarnya lahir atau bersumber pada penghormatan hak dasar setiap individu terhadap kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pendidikan pluralisme agama, selain menjadi prinsip-prinsip universalisme, kebebasan, kesetaraan,¹⁶ rasionalisme, humanisme transnasional, nilai-nilai global,¹⁷ peradaban, kasih sayang dan keindahan,¹⁸ pluralisme agama juga merupakan hak prerogatif Tuhan,¹⁹ bahkan *sunnatulla>h*.²⁰ Namun pluralisme agama saat ini masih dipandang sebagai paham yang tidak berasal dari Islam. Sehingga terjadi saling fitnah dan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, seperti; tuduhan liberal, sekuler, dan westernisasi.

Lebih jauh lagi sebenarnya, sikap anti pluralisme agama ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang mengitarinya. Beberapa aspek tersebut antara lain;

¹⁶Heiner Bielefeldt, "Misperceptions Freedom of Religion or Belief" *Journal of Human Right Quarterly*, 35, No. 1 (2013): 33-68. <https://muse.jhu.edu/article/497782/> summary. Diakses tanggal 19 Februari 2016.

¹⁷Muhammad Khalid Masud, "the Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions" in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, eds., Sohail H. Hashmi (The United of America Princeton University Press, 2002), 136.

¹⁸Abdul Rozak and Others, "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholis Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", *Asian Social Science International Journal*, 11, No. 27 (2015): 142-145. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36113>. Diakses tanggal 20 februari 2016.

¹⁹Dalam al-Qur'an, setidaknya ada empat tema pokok tentang pluralisme agama. *Pertama*, tidak ada paksaan dalam beragama (Qs.2:256). Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam beragama. Yaitu keikhlasan dalam beragama; *Kedua*, al-Qur'an mengakui eksistensi pemeluk agama-agama (Qs.2:62). Ayat ini menegaskan bahwa setiap pemeluk agama apabila percaya kepada Tuhan, hari akhir dan berbuat amal saleh, maka tidak perlu merisaukan tentang dirinya, karena semua yang dilakukan itu akan mendapat balasan dari Tuhan; *Ketiga*, kesatuan nabi (Qs.42:13). Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu rukun iman dalam Islam adalah meyakini semua Nabi dan Rasul secara teologis; *Keempat*, kesatuan pesan ketuhanan (Qs.4:131). Ayat ini menjelaskan bahwa semua Rasul diberikan kitab suci agar menyembah Allah. Ihsan Ali Fauzi, et al., "Membela kebebasan beragama: Catatan Pengantar" dalam *Membela Kebebasan Beragama Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, penyunting Budhy Munawar-Rachman (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), xii.

²⁰Alasan Abdul mengatakan *Sunnatulla>h*, dikarenakan kesadaran diri seseorang atas hak eksistensi komunitas lain yang mengharuskan setiap orang berlainan keyakinan, kepercayaan dan melakukan dialog. Tujuan dialog ini adalah untuk menemukan penyelesaian perbedaan secara utuh mengenai pendapat masing-masing agama. Abdul Dubbin Hakim, "Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam *menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, eds., Abdul Halim (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 14.

aspek *epistemology*,²¹ *soteriology*,²² dan *orthopraxis*.²³ Untuk menjawab fenomena ini, peran para pendidik dan tokoh agama menjadi penentu dalam menafsirkan makna dan maksud dari paham pluralisme agama, yang selanjutnya apakah makna dan maksud dari paham pluralisme itu dapat menciptakan toleransi antar umat beragama atau tidak sama sekali.²⁴

Dalam tradisi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Abdulaziz Sachedina, pluralisme secara jelas menerangkan: *Pertama*, pluralisme menginspirasi peradaban yang di dalamnya terdapat ide-ide pluralistik yang mengajarkan nilai-nilai moral serta tata cara berinteraksi dengan komunitas lain; *Kedua*, pluralisme bersifat kontekstual, sehingga Muslim dapat menghilangkan sekat budaya, nasional, universalitas yang dilandasi kebijaksanaan dan moral “live and let live” (hidup dan membiarkan hidup); *Ketiga*, sebagai agama wahyu, Islam mengajarkan untuk tidak memaksa orang lain beragama Islam, akan tetapi diperintah untuk berdialog antar umat beragama.²⁵

Dalam memahami dan memaknai pluralisme agama, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi eksoteris dan dimensi esoteris. Dimensi eksoteris, bersifat terbatas, karena keterbatasan itu ditetapkan oleh penganut agama sendiri. Namun, kebenaran yang ditetapkannya tidak mempengaruhi kebenaran eksoteris secara hakiki dimana dimensi eksoteris memiliki sifat

²¹Agama secara epistemologi memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Secara sosiologi, dimana seseorang yang beragama memiliki suatu komunitas religi yang terikat dengan doktrin dan hukum agama; 2) Secara Psikologi, agama berkaitan dengan psikologi dan spiritual diri orang yang beragama (*homo religious*). Samuel Lebens, *The Epistemology of Religiosity: an Orthodox Jewish Perspective*, *International Journal for Philosophy of Religion*, 74, No. 3 (2013): 315-332.

²²Seteorologi berasal dari Bahasa Yunani *so>te>ria* yang berarti pembebasan, keselamatan dan *logos* berarti wacana, penalaran. Istilah ini merujuk pada diskusi doktrin teologis tentang keselamatan. Sejak lahirnya Islam sampai sekarang, tema ini masih menjadi pembicaraan para pemikir Muslim. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika keselamatan (*salvation*) menjadi tema sentral al-Qur’an. Muhammad Hasan Khalil, “Islam and the Fate of Other”, *the Salvation Question* (New York: Oxford University Press, 2012), 1. Sementara Francois Faccini mendefinisikan seteorologi dengan kepercayaan Islam sebagai sebuah agama monotheisme yang memberikan keselamatan pada hari pembalasan. Marjana Harcet, “Perception of Islam and its Interpretations”, *Journal for the Study of Religious and Ideologies*, 13, No. 38 (2014): 39-56.

²³Ortopraxis adalah suatu sikap atau tindakan untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan dosa. James A. Kelhoper, “Reciprocity as Salvation”, *Crist as Salvific Patron and The Corresponding (Payback) Expected of Christ’s Earthly Clients according to the Letter of Clement*”, *Journal of Salvation Studies*, 59, No. 3 (2013): 456.

²⁴Marta Axer, “Is God Back?” *Reconsidering the New Visibility of Religion*, eds., Titus Hjelm (Chanel India: Deanta Global Publishing Services, 2015), 20.

²⁵Abdulaziz Sachedina, *Dialogical Conversation to Search for Principles of Interfaith Relations: the Future of Pluralistic World Other*, in *Joint Christen-Muslim Theological reflections* (German: The Lutheran World Fereation, 2015), 31-32.

lahiriah dan batiniah.²⁶ Untuk menghindari pengetahuan eksoteris yang dapat mengaburkan makna eksoteris, perlu dilakukan perubahan intelektual dan tindakan yang bersifat mengatur kehidupan. Seseorang yang tidak mampu memahami pluralitas agama secara eksoteris, maka paham universalitas agamanya tidak berguna bagi keselamatan, bahkan dapat menimbulkan sifat otokrasi dan sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban dan larangan agama.

Paham universalitas agama harus berasaskan “kebenaran sempurna” dan “tidak memihak” agar penganut agama dapat dikelompokkan, baik secara simbolik maupun metafisik menjadi “umat terpilih” dan “penyerahan diri” (*al-Isla>m*).²⁷ Pandangan eksoteris menganggap agama itu berbeda satu sama lainnya hanya didasarkan pada kesadaran kognitif manusia. Sedangkan dari tinjauan metafisik semua agama berada pada tingkat tertinggi dan terdapat titik temu berbagai agama wahyu (*Abrahamic*).

Kedua, dimensi esoteris, dimensi ini erat kaitannya dengan metafisika dan simbolisme mistik dalam agama. Meskipun demikian, metafisika dan simbolisme mistik sama sekali tidak bertentangan dengan agama, sebab dalam esoteris tidak ada kebenaran superior. Kebenaran paripurna yang menjadi inti dari semua agama didukung oleh al-Qur’an, begitu pula dengan pesan-pesan agama yang bersifat metafisik di dalamnya hanya dapat diperoleh dengan keyakinan. Hal ini dapat dijumpai dalam al-Qur’an pada istilah *al-Di>n* (ketundukan, kepatuhan, ketaatan) yang} dalam al-Qur’an mengandung makna tidak hanya hukum agama tertentu, namun juga berkaitan dengan kebenaran-kebenaran spiritual paripurna yang tidak berubah-ubah yang dalam terminologi Nurcholis Madjid, hal ini disebut “kebenaran Perennial” (kebenaran primordial manusia),²⁸ karena dalam kaitannya dengan keyakinan, setiap agama memiliki cara tersendiri untuk berhubungan dengan Tuhan.²⁹ Esoteris dari agama ini perlu disosialisasikan dan direalisasikan, apalagi jika disembunyikan, sebab jika agama masih terikat dengan dimensi eksoterisnya, maka sebenarnya seorang penganut agama hanya akan berpegang teguh pada bagian luar agama bukan inti dari agama itu sendiri.³⁰

Dengan demikian, ide pokok yang terkandung dalam esoteris-perennial dari penjelasan semua agama pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama,

²⁶Frithjof Schuon, *Understanding Islam* (The United State of America: World Wisdom, 1998), 7.

²⁷Frithjof Schuon, *Understanding Islam*, 8.

²⁸Lihat Budhy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholis Madjid: Islam dan Pluralisme* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 62.

²⁹ Frithjof Schuon, *Roots of The Human Condition* (Paris: World Wisdom Book, 1990), 12.

³⁰Seyyed Hossein Nasr, *the Need for a Sacred Science* (The United Kingdom: Curzon Press Ltd, 1993), 174.

yaitu untuk menyembah satu Tuhan, namun dengan cara yang masing-masing berbeda.³¹

C. Analisa Konstruks Pluralisme Agama

Konstruks pluralisme agama semakin bertambah kuat terutama pasca berkembangnya konsep masyarakat madani yang berkembang dalam wacana-wacana akademik.³² Sifat dan karakter masyarakat madani adalah *free public sphere* (ruang publik bebas), maksudnya adalah bahwa seluruh aktivitas dan interaksi di masyarakat tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Masyarakat berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Selain *free public sphere*, Karakteristik lainnya dari masyarakat madani adalah demokratisasi, yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga menciptakan masyarakat yang demokratis dan terbuka. Dalam rangka

³¹Rahman, dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa mistisme dianggap sebagai sistem pemikiran keagamaan yang berusaha mengetahui Tuhan melalui mediasi dan beribadah untuk menemukan makna hubungan dengan Tuhan melalui tindakan spiritual. Mistisme tidak dapat dianggap sinonim dengan okultisme, karena sasaran mistisme berbeda dengan okultisme. Mistisme fokus pada upaya pencarian terhadap rahasia suci, sedangkan okultisme menekankan tentang manusia yang bertujuan membawa seseorang dalam kontrol kekuatan magis. Dalam penelitiannya, bahwa ajaran-ajaran yang sama dengan tasawuf tidak saja dimiliki oleh Islam. Dalam Hindu muncul istilah *moksha* atau *satori* yang berarti suatu keadaan berhubungan dengan Tuhan. Pada Kristen, dikenal istilah *theosis* yang berarti keadaan pengasingan penuh dari kemewahan duniawi dan membangun kesinambungan dengan Tuhan. Walaupun tujuan tertinggi setiap jalan atau metode berbagai praktik sufistik pada umumnya sama, yakni kesadaran suci untuk bersatu dengan Tuhan dan bernilai spiritual, namun sifat dan jenis praktik sufistik saling berbeda dalam berbagai tradisi agama. Habib al-Rahman, "The Impact of Mysticism on Socio-Economic Life", *The Dialogue*, 5, No. 1 (2010): 40.

³²Masyarakat madani merupakan istilah lain dari *civil society*. Masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah *civil society's* yang identik dengan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *civil society* dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta adanya keterikatan dengan nilai-nilai hukum yang disepakati dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga Negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious dengan bercirikan iman dan takwa, kritis argumentative, kreatif, berfikir dan berperasaan jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin yang jujur dan adil menyikapi media massa secara kritis dan objektif, berani tampil dan bermasyarakat secara professional, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini dan merawat cita-cita Indonesia di masa yang akan datang. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 179.

menumbuhkan demokratisasi itu, dibutuhkan kesiapan setiap anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta memiliki niat dan upaya untuk berperilaku demokratis kepada orang lain. Masyarakat madani juga berkarakter toleran, pluralis, berkeadilan sosial, dan memiliki partisipasi sosial yang tinggi—partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi dari pihak lain—sehingga masyarakat madani memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab, sekaligus memberikan jaminan terhadap terciptanya keadilan sosial dan keselarasan di tengah kehidupan bermasyarakat.³³

Masyarakat madani, sebenarnya merupakan *impact* dari fenomena modernitas yang ternyata dibarengi dengan munculnya fenomena kebangkitan agama-agama dunia (keinginan untuk mendalami agama kembali), yang pada saat bersamaan juga tercium aroma primordialisme, sektarianisme, dan radikalisme.³⁴ Para pendidik agama dan penggerak dakwah sosial-keagamaan bertanya-tanya, Mengapa program “transmisi” dan “konservasi” nilai keagamaan yang begitu mulia dan berharga di berbagai tradisi keagamaan berubah menjadi “intoleransi” dan “konfrontasi”? Mengapa pada zaman yang semakin modern para ilmuwan justru semakin memprediksi adanya *clash of civilization*?³⁵ Bukankah era modern diklaim sebagai era paling *civilized* (berkeadaban) dalam catatan sejarah umat manusia? Mungkin benar prediksi ini, tetapi mengapa kekerasan yang mengatasnamakan agama muncul dimana-mana. Seperti di Irlandia, Palestina, Ambon, Poso, Karachi, Chechnya, Thailand Selatan, Madrid, Casablanca, Nigeria, Riyad, atau Afganistan. Mengapa setiap menjelang pergantian peralihan kepemimpinan politik, seperti di Indonesia pada 1996-1998, terjadi *riot* (kerusuhan) yang sungguh mengkhawatirkan bagi kehidupan bersama?³⁶ Mengapa Bom diledakkan di berbagai tempat? Di Indonesia terjadi peledakan Bom di Bali (Legian Kuta), Jakarta (Hotel Marriot, Kuningan) dan di beberapa tempat yang lain seperti Poso, Ambon dan lain-lain.

Dinamika masyarakat madani-modern dan aktivitas disintegrasi bangsa, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan sebagai jalur pembelajaran, pelatihan, pemberian pengalaman (*transfer of experiences*) yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman dan pengamalan pendidikan di

³³Adam Ferguson, *an Essay on Theory of Civil Society* (Teddington: Echo Library, 2007), 6.

³⁴Bassam Tibi, “Islamic Humanism vs Islamism: Cross-Civilizational Bridging”, *An Interdisciplinary Journal*, 95, No. 3 (2012): 230-254.

³⁵Samuel P. Huntington, *the Clash of Civilization and the Remaking of World Other* (New York: Simon and Schuster, 1996), 56.

³⁶Mohtar Mas’oed, eds., *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), 52.

era pluralitas agama dan budaya sekarang ini.³⁷ Pendidikan sebagai sebuah proses (humanisasi) menitikberatkan pada pembentukan makhluk sosial yang memiliki otonomi moral, sensitivitas psikologi, serta mempunyai kedaulatan budaya, sehingga mampu mengelola konflik, menghargai kemajemukan, dan memahami serta mencari solusi terhadap permasalahan silang budaya.³⁸

D. Toleransi Budaya dan Agama di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Toleransi budaya dan agama di lembaga pendidikan dapat diupayakan melalui aktivitas pembelajaran di sekolah. Dalam mengajarkan materi pelajaran, pendidik harus mampu menggunakan pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran tertentu yang dalam mentransformasikan budaya dan agama dipandu secara pelan-pelan dan tidak menjadikannya sebagai sebuah revolusi yang dipaksakan terlebih lagi di daerah-daerah minoritas Muslim seperti Bali.³⁹ Pendidikan Agama Islam di Bali haruslah mampu menangkap keunikan dan budaya masyarakat setempat, sehingga proses pendidikan agama (Islam) tidak menambah jarak antara kaum minoritas dan mayoritas, begitu juga dengan agama dan budaya dari dua komunitas tersebut.⁴⁰

Eksistensi masyarakat Bali dalam memelihara keunikan dan keluhuran budayanya, merupakan suatu penciptaan khazanah kebudayaan yang dipastikan sudah ada sejak ratusan tahun silam bisa dan dibilang bukanlah sesuatu yang baru tumbuh. Keseharian masyarakat Bali yang senantiasa menampilkan warna budaya lokal, menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang dengan ditemukannya berbagai arkeologi di berbagai wilayah di Bali ini membuktikan bahwa perjalanan panjang Pulau Bali bersamaan dengan wilayah dan pulau-pulau lain di nusantara.⁴¹ Lalu unsur apa yang membuat Bali memiliki *taksu* (kedalam kekuatan magis yang mampu memikat banyak orang) yang melenakan orang lain sehingga membuat Bali menjadi sebuah realitas yang berbeda dari berbagai realitas lain

³⁷Di Tengah perubahan yang begitu cepat dan tak terduga lingkungan pendidikan dan dunia pendidikan ditantang untuk bisa memberikan layanan pendidikan bermutu yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat setempat. Acmad Sanusi, Pendidikan untuk Kearifan (Bandung: Penerbit NUANSA, 2016), 192.

³⁸Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah: "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara" (UU RI No 20 Tahun 2003).

³⁹Sapendi, "Pendidikan Pluralisme Agama", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 2, No. 2 (2012): 154-182.

⁴⁰Kennet Wain, "Higher Education in Europe: Education and Tolerance", *Journal for Tolerance and Education*, 21, No. 1 (2011): 23-39.

⁴¹Abdul Wahib, "Pergulatan Pendidikan Agama Islam di Kawasan Minoritas Muslim", *jurnal PAI IAIN Walisongo Semarang*, 3, No. 4 (2011): 54-76.

di seluruh dunia? Memang pada awalnya budaya lokal Bali kuno berbenturan dengan budaya Hindu Jawa dari Majapahit yang bermigrasi ke Bali karena terdesak oleh perkembangan Islam dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-14.

Penolakan penduduk Bali selanjutnya menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai daerah di Bali. Secara perlahan namun pasti dan dengan adanya upaya akulturasi dan adaptasi dari kedua belah pihak, Bali berhasil menemukan serta menciptakan model budaya yang sesuai dengan pola pikir masyarakatnya yang didasarkan pada filosofi Bali dimana filosofi tersebut selalu berhubungan dengan kondisi alam Bali. Model adaptasi dan akulturasi ini selanjutnya membentuk masyarakat dan budaya Bali—yang diwarisi hingga kini—menjadi unik dan khas, yaitu mampu menyerap unsur budaya “Agung” (Hindu dan Jawa Majapahit), namun kental dengan warna lokal Bali.⁴² Bahkan Clifford Geertz, menyatakan, bahwa apa yang di era lampau masih sebatas konsep-konsep filosofis di telatah Jawa, pada akhirnya kini menjadi praktik kultural pada tataran kehidupan bermasyarakat di Bali.⁴³

Sementara eksistensi Muslim di Bali, dimulai sejak abad ke-13 M di zaman Kerajaan Gelgel pada era kepemimpinan Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460).⁴⁴ Lain halnya dengan di Kerajaan Gelgel, keberadaan Muslim di Jembrana, sudah mulai ada setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh penyerangan Kerajaan Demak Islam sekitar tahun 1518.⁴⁵ Seiring dengan peristiwa itu, pelan tapi pasti, banyak diantara kerajaan *vassal* Majapahit mendeklarasikan diri sebagai penganut Islam. Akibat realitas tersebut, para tokoh agama (Hindu dan Budha), para pembesar kerajaan (pejabat negara), dan atau para pangeran yang tidak mau menerima Islam sebagai sebuah agama dan peradaban baru, memilih untuk bermigrasi ke berbagai wilayah lain di Jawa dan termasuk Bali.

Di Jembrana dan Bali pada umumnya, dikenal satu bait sastra yang intinya digunakan sebagai slogan lambang Negara Indonesia, yaitu: Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Manggrua, yang bermakna “Kendati berbeda

⁴²Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 1.

⁴³Lihat Yudhis M. Burhanuddin, *Bali yang Hilang: Pendatang Islam dan Etnisitas di Bali* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 52.

⁴⁴Raja Gelgel mengadakan kunjungan ke Keraton Majapahit untuk bertemu dengan Raja Hayam Wuruk dalam rangka menghadiri sebuah konferensi kerajaan seluruh Nusantara. Setelah acara tersebut selesai, Dalem Ketut Ngelesir pulang ke Bali dan diantar oleh Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil bersama 40 orang pengiring dari Majapahit yang beragama Islam. Kemudian di Gelgel, mereka menempati suatu pemukiman dan membangun masjid yang diberi nama Masjid Gelgel, yang kini merupakan tempat Ibadat umat Islam tertua di Pulau Bali. Peristiwa inilah yang oleh para sejarawan dijadikan bukti kuat mengenai masuknya Islam di Bali pada abad ke-13 yang berpusat di Kerajaan Gelgel, Bali. Ustadz Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 252.

⁴⁵Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 151.

namun tetap satu jua tiada duanya (Tuhan-Kebenaran) itu”.⁴⁶ Dari sini dapat dipahami, bahwa masyarakat Jembrana dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, seperti; Islam, Kristen, Budha, dan lainnya, dengan tidak menjadikan perbedaan sebagai sekat yang menghalangi mereka untuk berinteraksi. Pada masyarakat Jembrana juga dikenal filosofi “menyama-braya”,⁴⁷ yakni persaudaraan yang betul-betul diterapkan dalam kehidupan umat beragama di Jembrana.

Pola perkembangan budaya Jembrana di masa-masa berikutnya mulai zaman penjajahan sampai era kemerdekaan, secara alamiah tetap mengikuti alur yang sama, yaitu menerima pengaruh budaya dari luar yang dilebur dan “disatulinikan” ke dalam warna budaya lokal. Sebagai contoh, dari segi arsitektur rumah, kaum pendatang boleh mendesain rumah sesuai dengan kultur arsitektural yang dibawa dari tanah asalnya tetapi warna khas Bali umumnya dimasukkan. Ketentuan tidak boleh membangun rumah yang lebih tinggi dari pohon kelapa juga harus diperhatikan. Dari 231.707 penduduk Jembrana,⁴⁸ dapat dipersentasekan, 72.18% penduduknya beragama Hindu,

⁴⁶Keragaman dalam masyarakat majemuk merupakan sesuatu yang alami yang harus dipandang sebagai suatu fitrah. Hal tersebut dapat dianalogikan seperti halnya jari tangan manusia yang terdiri atas lima jari yang berbeda, akan tetapi kesemuanya memiliki fungsi dan maksud tersendiri, sehingga jika semuanya disatukan akan mampu mengerjakan tugas seberat apapun. Untuk menyadari hal tersebut, Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat penting, karena sesungguhnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki landasan filosofis yang sangat kuat, yang mengakar pada perbedaan suku, etnik, bahasa, agama, dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Tujuan tersebut bukan sesuatu yang bersifat *taken for granted*, melainkan harus diupayakan salah satunya melalui proses pendidikan yang multikulturalistik, yaitu pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama, dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas. Laila Octaviani, “Pandataran dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural Di SMA Taruna Nusantara Magelang”, *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5, No. 1 (2013): 112-127. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2383>. Diakses tanggal 1 Maret 2018.

⁴⁷Menyama-Braya adalah konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali sebagai filosofi dari *karma margha* yang bersumber dari sistem nilai *budaya* dan adat istiadat masyarakat Bali untuk dapat hidup rukun. Menyama-braya juga berarti bahwa masyarakat setempat telah menerapkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 dan 29 tentang hak asasi manusia yang memastikan kebebasan, menghormati kebebasan orang lain, kebebasan harus sebanding dengan kewajiban dalam masyarakat. Dalam konstitusi 1945, hak asasi manusia diatur dalam Bab XI, Pasal 28A-J dan khusus untuk kehidupan beragama diatur dalam Pasal 28E 3, Bab XI, Pasal 29 tentang agama. Dewa Agung Gede Agung, Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, I Nyoman Ruja, “Menyama Braya as Social Capital of Hindu and Muslim Community: A Case Study in Bali-Indonesia”. *International Journal of West Asian Studies*, 9, No. 1 (2017): 159-166.

⁴⁸Lihat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

disusul umat Islam dengan jumlah penduduk 81.329 jiwa atau 25.34%, kemudian Kristen berjumlah 4.090 jiwa atau 1.27%, lalu katolik berjumlah 2.786 jiwa atau 0.87% Budha 1.069 jiwa, atau 0.33%, Konghucu 15 jiwa, atau 0.00% dan aliran kepercayaan 12 jiwa atau 0.00%.

Masing-masing agama tersebut berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Namun demikian, realitas tetap menunjukkan bahwa Hindu menjadi agama mayoritas, sehingga hal ini berdampak pada setiap sisi kehidupan di Jembrana. Seperti setiap bangunan atau gedung, baik itu milik pemerintah ataupun swasta, gedung-gedung sekolah dan perkantoran hampir seluruhnya terdapat warna budaya-Hindu, seperti pura-pura kecil, gapura dan atap bangunan. Begitu juga dengan nama-nama jalan semua juga bernuansa Hindu, seperti jalan Nakula, jalan Sadewa, jalan Arjuna, jalan Majapahit, jalan Melati, jalan Mahendradata, dan lain-lain.⁴⁹ Diikuti juga dengan bangunan peribadatan seperti pura-pura besar antara lain Pura Majapahit dan Pura Jagat Nata yang merupakan salah satu pura terbesar di Jembrana, itu artinya, bahwa Hindu telah mengakar di wilayah ini.

Kondisi kehidupan umat beragama yang “mesra dan harmonis” selama ini dapat diwujudkan di Pulau Dewata khususnya di Jembrana, bertujuan untuk mendukung serta memelihara situasi yang aman, nyaman dan tenteram, sekaligus memberikan kesejukan di hati siapa saja yang tinggal di Jembrana. Masyarakat Jembrana, menganggap kaum pendatang (Muslim) ke daerahnya sebagai saudara. Mereka (umat Hindu) menyebut Muslim dengan sebutan *nyama-selam* sebagai sebutan penghormatan warga Jembrana kepada kaum Muslim di Pulau Dewata. *Nyama* bermakna saudara, sementara *selam* bermakna Islam.⁵⁰

Meskipun secara umum tidak ada letupan krusial yang muncul di permukaan terkait relasi Hindu dan Muslim di Bali, bukan berarti relasi antar umat beragama ini (Hindu dan Muslim) tidak ada masalah sama sekali. Masalah besar yang kelihatannya sederhana misalnya dalam hal sulitnya orang Islam mendirikan masjid. Jika masjid juga berdiri, maka pada “moment-moment” tertentu tidak diperkenankan menggunakan sarana pengeras suara. Begitu juga dengan beberapa saat setelah Megawati kalah dari Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dalam *voting* pemilihan presiden ada beberapa masjid yang dilempari batu.

Dua kali terjadinya Bom di Bali yang dilakukan kelompok Amrozi dan kawan-kawannya, juga menimbulkan kontra-reaksi dikalangan masyarakat Hindu Bali termasuk Jembrana. Dampaknya, kaum Muslim yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan Amrozi dkk, menerima perlakuan yang kurang

⁴⁹Lihat profil daerah Kota Negara 2015.

⁵⁰Ayu Sulistyowati, “*Nyama Selam*” dan *Harmonisasi di Pulau Dewata*,” dalam artikel online <http://www.kompas.com/kompas-cetak>. Diakses tanggal 23 Februari 2017.

mengenakkan sebagai akibat dari Bom tersebut, berupa kesulitan melaksanakan aktivitas keagamaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya.⁵¹ Ledakan Bom itu menorehkan luka, bahkan trauma yang berat bagi seluruh masyarakat yang menetap di Pulau Bali.

Setelah Bom Bali I disusul dengan Bom Bali II, goresan luka yang tadinya belum sembuh seolah semakin “menganga”, sehingga akibat dari peristiwa itu semakin terasa bagi umat Islam di Bali. Beberapa saat setelah ledakan Bom II, isu pengusiran orang-orang Islam semakin menguat. Isu ini menyebar dari *handphone* ke *handphone* ataupun melalui media sosial lainnya. Tas-tas wanita berjilbab diperiksa satu persatu jika ingin masuk pasar swalayan atau mall dan berbagai perlakuan lain yang kurang menyenangkan. Isu tersebut menyebar di kalangan orang-orang Islam sebagai *warning* agar umat Islam betul-betul siap mental jika harus angkat kaki dari Bali.⁵² Situasi yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan formal, pendidik (Guru Agama Islam) di sekolah mendapatkan tantangan dan kesulitan yang tidak kalah peliknya. Para pendidik tersebut dicibir, *diolok-olok* dan “diminta pertanggung jawaban” atas kesalahan yang sama sekali tidak mereka lakukan bahkan mereka pahami. Para pendidik yang mengajar agama Islam harus menjawab berbagai pertanyaan dari pihak Hindu dan bahkan Muslim sekaligus.

⁵¹ Azyumardi Azra, “Psikologi Minoritas-Mayoritas” *Majalah Gatra*, 25 September 2008.

⁵² Peledakan Bom di Bali, memunculkan problema sosial yang akut di tanah Bali, terutama terkait eksistensi pendatang yang acapkali (disengaja atau tidak) disatulinikan dengan etnis Jawa terutama orang Islam. Wacana yang bernuansa etnis dan pencabaran beraroma agama terasa menguat, bukan saja dikalangan jelata, tapi juga dikalangan elit Bali. Ungkapan sinis bahwa “Orang Jawa jual bakso beli tanah sedangkan orang Bali jual tanah beli bakso” hanyalah salah satu contoh betapa sentiment etnisitas tampaknya menggelora dalam relung hati sebagian elit Bali yang problemnya justru di sosialisasikan pada masyarakat level bawah. Bahkan wacana vulgar sempat dikonkretkan melalui gelora kebijakan “bakso pakraman” yang nuansanya tak sekadar sarat dengan etnis, tapi malah menggumpal dalam sentimen keagamaan. Sebab, kebijakan bakso *pakraman* salah satu substansinya adalah bakso tidak halal karena berbahan baku babi. Kebijakan ini diakui atau tidak merupakan simbolisasi dari penegasian terhadap bakso Jawa yang dijamin halal. Logika berbasis sentiment etnis-agama ini lantas dijadikan pijakan tentang semangat *Ajag Bali* yang oleh sebagian orang dikritik terlalu malu untuk mengatakan *Ajag* Hindu. Fenomena semacam itu di permukaan seolah-olah (bahkan sengaja dianggap) tidak menumbuhkan persoalan dalam hubungan sosial, terutama kaum Muslim. Tetapi jika diselami lebih mendalam, niscaya akan ditemukan berbagai realitas yang sangat problematik yaitu hubungan sosial kemasyarakatan, keagamaan, maupun terkait dengan kebijakan pemerintah. Lihat Dhuroruddin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 2.

E. Kesimpulan

Konflik bernuansa suku, agama ras dan antar golongan (SARA), sesungguhnya merupakan salah satu tipe konflik yang tak mudah untuk diuraikan terlebih lagi konflik agama, namun bukan berarti konflik tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. George Weige, memberi penilaian agama secara seimbang, menurutnya, agama dapat menjadi sumber konflik, di saat yang sama juga memiliki potensi kreatif yang dapat berfungsi sebagai jaminan yang kuat untuk menciptakan toleransi, pluralisme, demokratis, dan menjadi sebuah resolusi konflik nir-kekerasan.⁵³ Hal ini dapat terwujud, apabila adanya kesediaan dari pemeluk agama untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara mendalam, dewasa, toleran, dan pluralis.⁵⁴ Di samping itu juga, pelibatan nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan sebagai sarana pendukung dalam usaha menciptakan solidaritas sosial, mengawetkan, serta mengalih-generasikan budaya sehingga dapat meminimalisasi konflik sosial.⁵⁵

Khaled Abou el-Fadl, berpendapat, bahwa semangat toleran dan pluralis dari para penganut agama akan menentukan corak pemahaman teks suci agama tersebut secara toleran pula.⁵⁶ Dengan demikian, signifikansi atau peran para tokoh agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada para penganut agama menjadi sangat signifikan, apakah pemahaman yang diberikan itu eksklusif ataukah inklusif. Selanjutnya, berbagai pandangan tentang pentingnya toleransi, terimplementasi dengan baik di Jembrana, sehingga ketegangan semakin berkurang, dan peran pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jembrana juga begitu *intends* dalam menyosialisasikan serta memberi pemahaman tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam keragaman melalui pemanfaatan pranata-pranata sosial, seperti; kebudayaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, terlebih lagi jika

⁵³George Weige, "Religion and Peace an Argument Complexified" dalam Syeryl Brown dan Kimber Schaub eds., *Resolving Third Word Conflict: Challenge for New Era*, (Washington DC: US Institute of Peace Press, 1992), 173.

⁵⁴Konflik kekerasan muncul akibat para pemimpin agama mengidap apa yang oleh scoot Appleby disebut "religious illiteracy" (sebuah sikap kejumudan atau kedangkalan dalam menafsirkan agama). Selengkapnya lihat R.S. Appleby, *The Ambivalence of The Cared: Religion and Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman and Littlefield, 2000), 69.

⁵⁵Wasisto Raharjo Jati, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Jurnal Walisongo*, 21, No.2 (2013): 393-416.

⁵⁶Khaled Abou el-Fadl secara jelas menyebut bahwa "makna sebuah teks suci kerap kali bergantung pada moral pembacanya. Jika pembacanya intoleran dan penuh kebencian, maka demikianlah hasil penafsiran atas teks tersebut. Selengkapnya baca Khaled Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance in Islam* (Boston: Beacon Press, 2002), 23. Ibrahim Kalin, "Masādir al-Tasāmuh, wa'adam al-Tasāmuh fi al-Islam", *Majalah Adyan* (2009): 26-32.

dilihat dari sejarahnya, umat Hindu dan Islam di Jembrana sangat menjunjung toleransi beragama dan bermasyarakat.⁵⁷

Dalam dunia pendidikan, pemerintah telah memfasilitasi kebhinekaan yang terdapat di Indonesia melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003,⁵⁸ yaitu memberikan pendidikan agama sesuai agama yang dipeluk oleh para peserta didik adalah bagi peserta didik sekaligus menjadi kewajiban sekolah dengan harapan agar tidak ada diskriminasi dalam kegiatan keagamaan, sehingga tercipta hubungan toleransi yang kuat antar umat beragama.⁵⁹ Sehingga untuk merajut kebhinekaan yang ada di Jembrana, diperlukan suatu model pendidikan damai yang berbasis agama dengan tidak menghilangkan budaya serta kearifan lokal di dalamnya.⁶⁰ Hal ini penting untuk dilakukan, dengan tujuan agar pluralitas dan kemajemukan pada masyarakat Jembrana dan Bali pada umumnya agar tetap terpelihara selamanya.

Pendidikan Agama Islam dengan warna pluralisme, dipandang sebagai model pendidikan yang apresiatif. Karena di samping memperdalam nilai-nilai keagamaan, di saat yang sama tetap menjaga kearifan lokal setempat. Dalam pendidikan agama, para pendidik dan pendakwah harus *concern* dalam menyikapi keberagaman di daerahnya, karena hal ini merupakan tanggung jawab moral mereka. Begitu juga dengan orang tua, tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya menjadi suatu yang tidak boleh untuk dinapikan, karena baik dan buruknya akhlak anak disebabkan adanya campur tangan orang tua di dalamnya.

Meskipun Pendidikan Agama Islam menjadi *concern* dari berbagai pihak, namun untuk kasus Jembrana dan Bali pada umumnya, Pendidikan Agama Islam tetaplah sesuatu yang *exotic*. Letak eksotik-nya berada pada adanya kenyataan, bahwa Islam adalah agama minoritas yang dalam pengamalan ajaran agamanya dibayangi oleh kaum mayoritas (Hindu) yang “membalut” keanekaragaman budaya lokalnya dengan agama Hindu itu sendiri. Sehingga banyak dijumpai perbedaan-perbedaan dalam setiap elemen di dalamnya. Maka dari itu, pendidikan agama Islam di Bali, sedapat mungkin harus sejalan dengan kebudayaan dan keluhuran budaya Bali dengan tidak “mengeliminasi” ketauhidan yang telah ditentukan oleh agama. Menurut

⁵⁷Saleh Saidi et al., eds., *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali*, Denpasar: MUI (2002).

⁵⁸Lihat Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

⁵⁹Frederich Schweitzer, “Religious Individualization: New Challenges to Education for Tolerance”, *Journal of Religious Education*, 29, No. 1 (2013): 43-50.

⁶⁰Variasi agama dan kemajemukan yang terjadi pada masyarakat Jawa memberikan makna dan nuansa tersendiri. Agama Jawa dipandang penuh dengan campur aduk dengan kebudayaan lokal, simbolisme kultus, literalisme Islam, mistik dan bahkan Hinduisme. Umami Sumbulah, “Islam Jawa dan akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresi”, *Jurnal Budaya Islam el Harakah*, 14, No. 1 (2012): 51-68.

Frans Magnez Suseno, pendidikan agama dan pluralisme sangat berkaitan, karena semua agama sudah pasti mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai. Menurut pendapatnya, pendidikan pluralisme adalah suatu pendidikan yang mengandaikan setiap individu untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok batas tradisi budaya dan agama sehingga kita mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan.⁶¹

Dalam perspektif ajaran Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa, “orang Muslim adalah orang yang perkataan dan perbuatannya tidak meresahkan orang lain”.⁶² Secara tegas Nabi Muhammad SAW, menginformasikan bahwa seorang Muslim harus memberikan ketentraman bagi orang-orang di sekelilingnya, saling membantu dalam kebaikan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat. Bukan sebaliknya berbuat anarkis, *vandalism*, dan berbagai perbuatan negatif lainnya yang jauh dari konsep saling menghargai (*rahmatan lil ‘alamīn*).

Dalam rangka mengimplementasikan ajaran Nabi Muhammad SAW, kehidupan bermasyarakat di Jembrana begitu sangat inklusif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka melakukan kerja sama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dengan kelompok yang berbeda agama, diantaranya; gotong royong membangun masjid, membangun pura, sekolah dan begitu juga dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan. Masing-masing pemeluk agama saling menjaga keamanan dan kekhusukan dalam beribadah, seperti saling menjaga rumah, kalau agama Islam menunaikan ibadah Idul Fitri atau Idul Adha. Masyarakat yang beragama Hindu menjaga atau mengawal proses pelaksanaan hari raya tersebut dengan menugaskan *pecalang*⁶³ yang bertugas hampir sama dengan polisi, yaitu mengamankan jalannya proses peribadatan. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan*, Nyepi dan lain sebagainya, umat Islam menugaskan Barisan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengawal proses kekhusukan beribadah dan begitu juga dalam aktivitas

⁶¹Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 64.

⁶²Lihat Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Hadits No. 9* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 10.

⁶³***Pecalang*** berasal dari kata calang/celang yang dapat diartikan waspada. ***Pecalang*** adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desa adatnya (petugas keamanan desa adat). Keterlibatan *pecalang* dalam keamanan dan ketertiban wilayah desa adat, diatur dalam Peraturan Daerah Bali No, 3 Tahun 2001, yakni pada Bab X, pasal 17 yang berbunyi: 1) Keamanan dan Ketertiban Desa *Pakraman* dilaksanakan oleh *pecalang*; 2) *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa *Pakraman* dalam hubungan tugas adat dan agama; 3) *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh Desa *Pakraman* berdasarkan *peramuhan* desa. Lihat Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010), 276.

adat. Mereka saling membantu dalam bentuk fisik maupun finansial, seperti acara pernikahan, selamat dan lain sebagainya. Semua itu dapat berjalan dengan baik, karena diikat dengan semboyan, yang telah di jelaskan di atas, yaitu “menyama-braya” antara *nyama-Bali* dan *nyama-Selam*.

Pentingnya studi ini, adalah untuk membuktikan bantahan terhadap *Journal* yang ditulis oleh Michalinos Zembylas dan Zvi Bekerman, lewat pembaharuan pendidikan khususnya di Jembrana, yaitu melalui penerapan model pendidikan pluralisme agama, diharapkan dapat merangkul seluruh kemajemukan yang ada di Jembrana. Dengan penerapan pengamalan pendidikan agama yang diintegrasikan dengan budaya serta kearifan lokal setempat, yang selanjutnya akan menghasilkan sebuah pendidikan agama yang tidak saja menghasilkan peserta didik yang saleh secara individual, tetapi juga menciptakan peserta didik yang saleh secara publik.

Ketika penganut agama secara produktif menempatkan kearifan lokal dan Islam secara bersama-sama dengan budaya, maka justru dapat mendorong ke arah kesatuan untuk menempatkan agama sebagai suatu yang suci. Sementara kearifan lokal menjadi sarana untuk menjembatani kepercayaan yang ada. Ini terjadi dalam praktik manajemen yang mengedepankan pertautan antara tradisi dan agama, sehingga menghasilkan produktivitas dalam bentuk sosial.⁶⁴ Dengan penanaman moral keagamaan yang baik, maka pasti akan diikuti dengan terbangunnya tradisi yang baik juga.⁶⁵

Terkait dengan isu di atas, fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diteliti. Maka untuk itu, penulis mengangkat sebuah judul yang relevan dengan isu tersebut, yaitu “Pendidikan Pluralisme Agama di Bali (Studi Kasus di Jembrana)”. Selanjutnya untuk mengantisipasi timbulnya pertanyaan mengapa Kabupaten Jembrana dijadikan sebagai objek penelitian, padahal Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota madya. Penulis telah menetapkan beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, faktor historis dan sosiologis relasi antara Hindu dan Muslim di Jembrana yang dalam proses interaksinya tetap berpedoman pada agama dan budaya masing-masing, bahkan dalam perkembangan selanjutnya telah menghasilkan sejumlah akulturasi di berbagai bentuk kehidupan masyarakat; *Kedua*, keberagaman penduduknya, atau dengan kata lain multikultural dan multireligius; *Ketiga*, Kehidupan masyarakatnya rukun dan bersahaja, sekalipun Kabupaten Jembrana sempat mengalami imbas dari konflik dalam hal ini Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005. Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian ini mempunyai beberapa

⁶⁴W. E. Garah, R. I. Beekun, A. Habisch, G. Lenssen, C. L. Adai, “Practical Wisdom for Management from the Islamic Tradition”, *Journal of Management Development*, 31, No. 10 (2012): 991-1000.

⁶⁵Ismail Suardi Wekke, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”, *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyat*, 13, No. 2 (2012): 307-335.

Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer karakter, berkontribusi signifikan, serta dapat didukung dengan data empiris, serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti.⁶⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Multikultural Multireligius* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- Axer, Marta, "Is God Back?" *Reconsidering the New Visibility of Religion*, eds., Titus Hjelm (Channel India: Deanta Global Publishing Services, 2015).
- Bielefeldt, Heiner, "Misperceptions Freedom of Religion or Belief" *Journal of Human Right Quarterly*, 35, No. 1 (2013): 33-68. <https://muse.jhu.edu/article/497782/> summary. Diakses tanggal 19 Februari 2016.
- Brauchler, B, "Integration and Exclusion: Islam Adat in Central Moluccas", *Indonesia and the Malay World*, 38, No. 110 (2010).
- Fauzi, Ihsan Ali, et al., "Membela kebebasan beragama: Catatan Pengantar" dalam *Membela Kebebasan Beragama Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, penyunting Budhy Munawar-Rachman (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011).
- Fuadi, Husin, Ahmad, "Rekonstruksi Pendidikan Islam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh", *Jurnal Tadris Terakreditasi Uin Sunan Ampel*, 9, No. 2 (2014).
- Friedman, Thomas L, "the World is Flat" *the Globalized World in Twenty-First Century* (London: Penguin Books, 2006).
- Haladi, "Pluralisme Agama dalam Konteks Demokrasi di Indonesia: Studi Pandangan M. Amien Rais", *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Hidayat, Komarudin, *Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Kobylarek, Aleksander, "Education and Culture Society", *international Scientific Journal*, No. 2 (2014).
- Kumbara, A.A. Ngurah Anom, "Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 4, No. 7 (2009).
- Keesing, Roger M, "On not understanding symbols: Toward an anthropology of incomprehension", *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 2, No. 2 (2012).

⁶⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 27.

- Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Mamun, Sukron, "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi", *Jurnal Binu University, HUMANIORA*, 4 No.2 (2013)
- Pageh, I Made, "Analisis faktor integratif Nyama Bali-Nyama Selam", *Jurnal Kebudayaan Bali*, 2, No. 2 (2013).
- Rahman, Fazlur, *Strategi Cita-Cita Islam*, Terj. Habibi Jannati (Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2013).
- Riyadi, Hendar, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama* (Jakarta: RMBOOKS & PSAP, 2006).
- Sachedina, Abdulaziz, *Dialogical Conversation to Search for Principles of Interfaith Relations: the Future of Pluralistic World Other, in Joint Christen-Muslim Theological reflections* (German: The Lutheran World Fereation, 2015).
- Sapendi, "Pendidikan Pluralisme Agama: Membangun Hubungan Sosial Lintas Agama di Sekolah", *Jurnal Khatulistiwa-STAIN Pontianak*, 2 No. 2 (2012).
- Tilaar, HAR, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012).
- [Michalinos Zembylas](#) & [Zvi Bekerman](#), "Peace education in the present: dismantling and reconstructing some fundamental theoretical premises", *Journal of Peace Education*, 10 (2013).
- Christian Zwingman, Markus Wirtz, Claudia Muller, Jurgen Korber, and Sebastian Murken, "Positive and Negative Religious coping In German Breast Cancer Patients", *Journal of Behavioral Medicine*, 29, No. 6 (2013).
- Bikhu Parekh, "Rethinking Multiculturalism" *Cultural Diversity and Political Theory* .<http://www.educationworld.com>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.
- Muslimin, *Islam dan Pendidikan Pluralisme*. <http://channelnahdliyin.com>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.
- Muhammad Khalid Masud, "the Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions" in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, eds., Sohail H. Hashmi (The United of America Princeton University Press, 2002).
- Abdul Rozak and Others, "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholis Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", *Asian Social Science International Journal*, 11, No. 27 (2015): 142-145. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36113>. Diakses tanggal 20 februari 2016.

- Abdul Dubbun Hakim, "Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam *menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, eds., Abdul Halim (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006).
- Samuel Lebens, "The Epistemology of Religiosity: an Orthodox Jewish Perspective", *International Journal for Philosophy of Religion*, 74, No. 3 (2013).
- Muhammad Hasan Khalil, "Islam and the Fate of Other", *the Salvation Question* (New York: Oxford University Press, 2012).
- Marjana Harcet, "Perception of Islam and its Interpretations", *Journal for the Study of Religious and Ideologies*, 13, No. 38 (2014).
- James A. Kelhoper, "Reciprocity as Salvation", Crist as Salvific Patron and The Corresponding (Payback) Expected of Christ's Earthly Clients according to the Letter of Clement", *Journal of Salvation Studies*, 59, No. 3 (2013).
- Frithjof Schuon, *Understanding Islam* (The United State of America: World Wisdom, 1998).
- Budhy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholis Madjid: Islam dan Pluralisme* (Jakarta: Democrazy Project, 2011).
- Frithjof Schuon, *Roots of The Human Condition* (Paris: World Wisdom Book, 1990).
- Seyyed Hossein Nasr, *the Need for a Sacred Science* (The United Kingdom: Curzon Press Ltd, 1993).
- Habib al-Rahman, "The Impact of Mysticism on Socio-Economic Life", *The Dialogue*, 5, No. 1 (2010).
- Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Adam Ferguson, *an Essay on Theory of Civil Society* (Teddington: Echo Library, 2007).
- Bassam Tibi, "Islamic Humanism vs Islamism: Cross-Civilizational Bridging", *An Interdisciplinary Journal*, 95, No. 3 (2012).
- Samuel P. Huntington, *the Clash of Civilization and the Remaking of World Other* (New York: Simon and Schuser, 1996).
- Mohtar Mas' oed, eds., *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000).
- Acmad Sanusi, *Pendidikan untuk Kearifan* (Bandung: Penerbit NUANSA, 2016).
- Sapendi, "Pendidikan Pluralisme Agama", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 2, No. 2 (2012).
- Kennet Wain, "Higher Education in Europe: Education and Tolerance", *Journal for Tolerance and Education*, 21, No. 1 (2011).

- Abdul Wahib, "Pergulatan Pendidikan Agama Islam di Kawasan Minoritas Muslim", *jurnal PAI IAIN Walisongo Semarang*, 3, No. 4 (2011)
- Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 1.
- Yudhis M. Burhanuddin, *Bali yang Hilang: Pendetang Islam dan Etnisitas di Bali* (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 252.
- Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 151.
- Laila Octaviani, "Pandatara dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural Di SMA Taruna Nusantara Magelang", *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5, No. 1 (2013): 112-127. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2383>. Diakses tanggal 1 Maret 2018.
- Dewa Agung Gede Agung, Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, I Nyoman Ruja, "Menyama Braya as Social Capital of Hindu and Muslim Community: A Case Study in Bali-Indonesia", *International Journal of West Asian Studies*, 9, No. 1 (2017).
- Ayu Sulistyowati, "Nyama Selam" dan Harmonisasi di Pulau Dewata," dalam artikel online <http://www.kompas.com/kompas-cetak>. Diakses tanggal 23 Februari 2017.
- Azyumardi Azra, "Psikologi Minoritas-Mayoritas" *Majalah Gatra*, 25 September 2008.
- Dhuroruddin Mashad, *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, 2.
- George Weige, "Religion and Peace an Argument Complexified" dalam Syeryl Brown dan Kimber Schaub eds., *Resolving Third Word Conflict: Challenge for New Era*, (Washinton DC: US Institute of Peace Press, 1992).
- R.S. Appleby, *The Ambivalence of The Cared: Religion and Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman and Littlefield, 2000).
- Wasisto Raharjo Jati, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Jurnal Walisongo*, 21, No.2 (2013).
- Khaled Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance in Islam* (Boston: Beacon Press, 2002), 23. Ibrahim Kalīn, "Masādir al-Tasāmuh, wa'adam al-Tasāmuh fi al-Islam", *Majalah Adyan* (2009).
- Saleh Saidi et al., eds., *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali*, Denpasar: MUI (2002).
- Frederich Schweitzer, "Religious Individualization: New Challenges to Education for Tolerance", *Journal of Religious Education*, 29, No. 1 (2013).

- Ummi Sumbulah, "Islam Jawa dan akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif", *Jurnal Budaya Islam el Harakah*, 14, No. 1 (2012).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Hadits No. 9* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 10.
- Nengah Bawa Atmadja, *Ajeng Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010).
- W. E. Garah, R. I. Beekun, A. Habisch, G. Lenssen, C. L. Adai, "Practical Wisdom for Management from the Islamic Tradition", *Journal of Management Development*, 31, No. 10 (2012).
- Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat", *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyat*, 13, No. 2 (2012).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

Saihu